



Peran Adam Malik dalam Perkembangan Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Adam Malik's Role in the Development of Indonesian Politics in the Early Independence Period

Tiffany Azriel Hasyim Purba*, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

Adam Malik was a pivotal figure in Indonesia's political history at the dawn of independence. As a journalist, diplomat, and politician, Malik played a key role in significant events that shaped the modern Indonesian state. This article explores Adam Malik's contributions to Indonesia's political development during the early independence period, highlighting his role in international diplomacy, national political movements, and efforts to defend Indonesia's independence from internal and external threats. This research employs a historical approach, examining various primary and secondary sources to provide a comprehensive picture of Adam Malik's influence on Indonesian politics.

ARTICLE HISTORY

Received 20/06/2024
Revised 24/06/2024
Accepted 04/07/2024
Published 05/07/2024

KEYWORDS

Adam Malik; Indonesian independence; political development; international diplomacy; national political movement.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ tifanyazrielhasyimpurba@gmail.com

PENDAHULUAN

Hubungan antar negara di dunia merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai konsekuensi dari tuntutan perkembangan zaman. Suatu negara membutuhkan negara lain sebagai mitra dalam mewujudkan konsep-konsep idealnya. Untuk menuju pola hubungan yang baik dan bermakna di antara kedua negara yang berinteraksi, diperlukan proses saling memahami yang kadangkala tidak mudah untuk dicapai. Pendidikan, aktivisme, karir jurnalistik, dan pengalaman diplomasi serta politiknya membentuk Adam Malik menjadi tokoh penting dalam perkembangan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan setelahnya. Adam Malik juga terlibat dalam aktivisme mahasiswa selama masa studinya di Belanda, yang membentuk pemikiran politik dan perjuangan kemerdekaannya (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara yang stabil. Peran tokoh-tokoh nasional sangat krusial dalam mengatasi berbagai hambatan politik, ekonomi, dan sosial. Adam Malik, yang dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Murba dan kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan politik Indonesia pada periode ini. Perannya dalam diplomasi internasional membantu Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain, sementara aktivitas politiknya di dalam negeri berkontribusi pada pembentukan sistem politik yang lebih stabil dan demokratis.

Sejarah politik Indonesia pada periode awal kemerdekaan ditandai oleh berbagai dinamika yang kompleks, termasuk perjuangan mempertahankan kedaulatan, konflik internal, dan upaya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Adam Malik, sebagai seorang jurnalis dan politisi yang aktif, memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek politik Indonesia. Sebagai salah satu pendiri Partai Murba, Malik terlibat langsung dalam perjuangan politik di dalam negeri, berupaya membentuk aliansi politik yang kuat dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Adam Malik lahir di Pematang Siantar, Sumatra Utara, pada 22 Juli 1917. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang jurnalis yang aktif menyuarakan aspirasi rakyat melalui media. Karier politiknya mulai menonjol ketika ia bergabung dengan gerakan kemerdekaan Indonesia dan mendirikan Partai Murba bersama Tan Malaka. Partai ini memainkan peran penting dalam pergerakan nasional dan mempengaruhi arah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Malik berperan besar dalam diplomasi internasional, terutama dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional. Ia terlibat dalam berbagai konferensi



internasional dan memainkan peran kunci dalam memperluas jaringan diplomatik Indonesia. Selain itu, Malik juga aktif dalam organisasi internasional seperti Gerakan Non-Blok, yang menjadi platform penting bagi Indonesia dalam menggalang dukungan dari negara-negara berkembang.

Malik juga memainkan peran penting dalam upaya penyatuan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa-masa awal setelah proklamasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan internal seperti pemberontakan daerah dan konflik politik antar partai. Peran Malik dalam diplomasi dan negosiasi politik membantu menjaga stabilitas nasional dan mempromosikan semangat persatuan dan kesatuan. Tujuan suatu negara melakukan hubungan internasional adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dan tidak dapat dipertemukan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik (Dam & Riswandi, [1995](#)). Adam Malik mengawali keterlibatannya dalam politik pada tahun 1930-an di Pematang Siantar, mengabdikan dirinya untuk perjuangan bangsanya mencapai kemerdekaan, yang kemudian ikut berperan secara fungsional sesudah kemerdekaan itu dicapai.

Pada pemerintahan Orde Baru, peranan Adam Malik dipercayakan sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam keterangan persnya pada tanggal 4 April 1966, Adam Malik mengatakan bahwa pemerintahannya akan mempertimbangkan kembali dan mengevaluasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, serta akan dituntun oleh realitas yang ada di dunia luar (Agustina, [2005](#)). Maka sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif secara konsisten. Kemudian pada tahun 1978, Adam Malik menjadi Wakil Presiden Indonesia kedua melalui proses politik yang melibatkan partai politik dan pemerintah saat itu. Dalam upaya memahami peran dan kontribusi Adam Malik dalam politik Indonesia, artikel ini akan mengkaji berbagai aspek dari kehidupannya, termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, karier jurnalisme, dan aktivitas politiknya. Melalui pendekatan historis dan analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh Adam Malik dalam pembentukan dan perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan sejarah masa lampau umat manusia. Metode historis terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi (kritik), interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, [1975](#)). Pada tahapan heuristik, peneliti mengumpulkan berbagai sumber sejarah, baik sebagai pengetahuan dalam menginvestigasi sumber-sumber sejarah maupun usaha-usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Data primer didapatkan dari surat kabar sezaman, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelusuran pustaka (Nurdin & Riana, [2013](#)). Dalam tahapan ini, peneliti berusaha untuk menemukan sebanyak mungkin sumber yang relevan untuk mendukung penelitian. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, langkah berikutnya adalah verifikasi atau kritik. Proses verifikasi dilakukan melalui dua tahapan, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal dilakukan untuk menguji kebenaran isi sumber sejarah, sementara kritik eksternal melibatkan pengujian keaslian sumber tersebut dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar sumber, seperti apakah sumber tersebut dapat dipertahankan dan dibuktikan kebenarannya (Yuliani, Farida, & Hasan, [2018](#)). Kedua jenis kritik ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat dipercaya. Tahapan berikutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini, data yang telah diverifikasi diinterpretasikan dengan cermat dan teliti agar tidak terlepas dari konteks hegemoni zaman itu. Interpretasi sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejarah, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peristiwa yang diteliti (Abdurrahman, [1999](#)). Tahapan akhir dari metode historis adalah historiografi. Tahapan ini merupakan proses penulisan atas semua rangkaian metode yang telah dilakukan sebelumnya sehingga menghasilkan karya sejarah yang sistematis dan terstruktur. Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan diinterpretasikan dalam bentuk tulisan yang koheren dan informatif (Irwanto, Dedi, Alian, & Sair, [2014](#)). Historiografi bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang dapat dipahami dan diakses oleh pembaca, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman sejarah. Dengan mengikuti keempat tahapan metode historis ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan analisis yang mendalam dan valid mengenai peran Adam Malik dalam perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan.

PEMBAHASAN

Adam Malik: Sang Jurnalis yang Menjadi Arsitek Politik dan Diplomasi Indonesia

Perjalanan hidup Adam Malik adalah sebuah kisah epik tentang transformasi seorang jurnalis muda yang berapi-api menjadi negarawan ulung yang berperan penting dalam membentuk lanskap politik dan diplomasi Indonesia. Lahir di Pematang Siantar pada 22 Juli 1917, semangat nasionalisme Malik mulai terpujuk sejak usia belia (Malik, [1981](#)). Ia tumbuh besar dalam lingkungan sosial yang dinamis, di mana semangat perjuangan kemerdekaan bergelora (Kahin, [1952](#)). Pengalamannya sebagai wartawan muda di Harian Pelita Andalas dan Majalah Partindo memberinya platform untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial (Ricklefs, [1981](#)). Tulisan-tulisannya yang tajam dan kritis membuatnya menjadi sosok yang disegani sekaligus ditakuti oleh penguasa (Dahm, [1971](#)).

Kiprah Politik di Awal Kemerdekaan

Seiring dengan berkobarnya semangat kemerdekaan Indonesia, Adam Malik tidak hanya menjadi penonton pasif. Ia terjun langsung ke dalam pusaran politik dengan mendirikan Partai Murba bersama Tan Malaka (Feith, [1962](#)). Partai ini menjadi wadah bagi kaum nasionalis progresif yang menginginkan perubahan radikal dalam struktur sosial dan politik Indonesia (Legge, [1964](#)). Meskipun Partai Murba tidak bertahan lama karena tekanan politik, namun peran Malik dalam menggalang kekuatan rakyat dan menyuarakan aspirasi kemerdekaan tidak bisa dipandang sebelah mata (Hughes, [2002](#)). Setelah Indonesia merdeka, Malik bergabung dengan Partai Masyumi dan terpilih sebagai anggota DPR mewakili Sumatera Utara pada tahun 1955 (Malik, [1982](#)). Di parlemen, ia dikenal sebagai tokoh yang vokal dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Malik juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik, seperti Gerakan Pembela Pancasila dan Front Nasional. Keterlibatannya dalam berbagai forum ini menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap pembangunan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat, baik dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, terjadi pergolakan politik yang mengancam stabilitas nasional. Sementara itu, di luar negeri, Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Di tengah situasi yang penuh gejolak ini, Adam Malik tampil sebagai tokoh muda yang energik dan penuh semangat juang. Ia tidak hanya berjuang di parlemen, tetapi juga turun ke jalan untuk menggalang dukungan rakyat. Malik juga aktif menulis artikel dan memberikan pidato-pidato yang membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme.

Salah satu momen penting dalam kiprah politik Malik di awal kemerdekaan adalah ketika ia memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 (Anderson, [1991](#)). Konferensi ini menjadi tonggak sejarah bagi negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bersama di panggung internasional. Malik, dengan kemampuan diplomasinya yang luar biasa, berhasil membangun jaringan kerjasama dengan para pemimpin negara-negara peserta konferensi. Ia juga berperan penting dalam merumuskan Dasasila Bandung, sebuah prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Gerakan Non-Blok.

Menteri Luar Negeri yang Visioner

Pada tahun 1966, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Luar Negeri oleh Presiden Soeharto. Inilah awal dari babak baru dalam karir politik Malik yang penuh dengan tantangan dan prestasi. Sebagai Menteri Luar Negeri, Malik dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan citra Indonesia di mata dunia setelah mengalami isolasi internasional akibat kebijakan konfrontasi dengan Malaysia. Dengan kecerdasan dan keterampilan diplomasi yang mumpuni, Malik berhasil menjalin kembali hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan membuka pintu bagi kerjasama internasional. Salah satu pencapaian terbesar Malik adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan mengembalikan Indonesia ke pangkuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga berperan penting dalam pembentukan ASEAN, sebuah organisasi regional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara Asia Tenggara. ASEAN menjadi salah satu pilar utama politik luar negeri Indonesia hingga saat ini.

Visi Adam Malik dalam politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh semangat Dasasila Bandung dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok (Malik, [1982](#)). Ia percaya bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dan berdaulat, tidak memihak pada blok kekuatan manapun, serta aktif memperjuangkan perdamaian dunia dan keadilan

sosial. Malik juga sangat memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang dan berupaya untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan.

Di bawah kepemimpinan Malik, diplomasi Indonesia mengalami masa keemasan. Ia berhasil membangun hubungan yang erat dengan berbagai negara, baik dari blok Barat maupun Timur. Malik juga aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti PBB, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ia dikenal sebagai diplomat yang ulung, cerdas, dan berwawasan luas. Kemampuannya dalam bernegosiasi dan membangun konsensus membuatnya disegani oleh para pemimpin dunia.

Diplomasi Mercusuar: Memimpin Sidang Umum PBB

Puncak karir diplomatik Adam Malik adalah ketika ia terpilih sebagai Ketua Sidang Umum PBB pada tahun 1971 (Malik, [1982](#)). Ini merupakan sebuah prestasi monumental bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya seorang wakil dari negara berkembang memimpin forum internasional paling bergengsi di dunia. Selama menjabat sebagai Ketua Sidang Umum PBB, Malik menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan visioner. Ia berhasil mendorong dialog dan kerjasama antara negara-negara maju dan berkembang, serta memperjuangkan kepentingan negara-negara Dunia Ketiga dalam berbagai isu global. Malik juga dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah.

Kepemimpinan Malik di PBB tidak hanya membawa harum nama Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan kemajuan dunia. Ia berhasil menjembatani perbedaan antara negara-negara yang bertikai dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Malik juga berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan teknologi.

Wakil Presiden dan Warisan Pemikiran

Pada tahun 1978, Adam Malik terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Soeharto (Schwarz, [1994](#)). Dalam posisi ini, Malik terus melanjutkan perjuangannya untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Ia mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan demokrasi. Meskipun tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah, Malik tetap konsisten menyuarakan pendapatnya demi kepentingan rakyat. Setelah masa jabatannya sebagai Wakil Presiden berakhir, Malik tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Ia mendirikan Yayasan Adam Malik yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan (Malik, [1982](#)). Malik juga menulis beberapa buku yang berisi pemikiran dan pengalamannya selama berkisah di dunia politik dan diplomasi.

Sebagai Wakil Presiden, Malik tidak hanya menjalankan tugas-tugas protokoler, tetapi juga memberikan masukan dan saran kepada Presiden Soeharto dalam berbagai isu strategis. Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki pandangan yang luas dan mendalam tentang berbagai permasalahan bangsa. Malik juga aktif melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.

Warisan pemikiran Adam Malik sangat relevan hingga saat ini. Ia adalah seorang negarawan yang memiliki visi jauh ke depan dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan bangsa. Malik juga dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Pemikiran-pemikirannya tentang politik luar negeri yang bebas aktif, kerjasama Selatan-Selatan, dan pentingnya dialog antarbudaya masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan global saat ini.

SIMPULAN

Adam Malik adalah seorang negarawan, diplomat, dan jurnalis yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Ia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan pembangunan bangsa. Sebagai Menteri Luar Negeri, ia berhasil meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dan menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Sebagai Wakil Presiden, ia terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Warisan pemikiran dan tindakannya akan terus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada peran Adam Malik dalam politik dan diplomasi Indonesia, dan tidak membahas secara mendalam tentang kehidupan pribadi dan keluarganya. Kedua, penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang terbatas, terutama dari buku-buku yang ditulis oleh Adam Malik

sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sumber-sumber yang lebih beragam untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang Adam Malik.

REFERENSI

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Agustina, J. P. (2005). *Politik Luar Negeri Indonesia terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik tahun 1967 - 1973*. Universitas Sanata Dharma.
- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Revised and Extended Edition). London: Verso.
- Dam, S., & Riswandi. (1995). *Kerja sama ASEAN : Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dahm, B. (1971). *History of Indonesia in the Twentieth Century*. London: Pall Mall Press.
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah : Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Hughes, J. (2002). *The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild*. Singapore: Archipelago Press.
- Irwanto, Dedi, Alian, & Sair. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Kahin, G. McTurnan. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Legge, J. D. (1964). *Indonesia*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Malik, A. (1981). *Mengabdi Republik, Volume 1*. Jakarta: Gunung Agung.
- Malik, A. (1982). *Mengabdi Republik, Volume 2*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurdin, S., & Riana, D. (2013). Analisis Perbandingan Penerimaan PKB Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB (Studi Pada Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan). *Jurnal Ecodemica*, 1(2), 1–14.
- Ricklefs, M. C. (1981). *A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the Present*. London: Macmillan.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Schwarz, A. (1994). *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. St Leonards, NSW: Allen & Unwin.
- Yuliani, R., Farida, & Hasan, Y. (2018). Perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Palembang Tahun 2000-2015 (Sumbangan Materi pada Mata Kuliah Sejarah Nasional Indonesia VII). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jc.v7i1.5303>